

2. URUSAN PENGAWASAN

Urusan pengawasan di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Wonosobo sesuai dengan Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.

a. Alokasi Program dan Kegiatan

Pemerintah daerah kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 8.031.340.952,-** atau 0,49% dari total APBD 2017 Rp. 1.638.111.600.485,-. anggaran sebesar Rp. 8.031.340.952,- dapat teralisasi sebesar **Rp. 7.593.511.692,-** atau 94,55%. Alokasi program dan kegiatan urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. III.F.2.1
Rincian Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pengawasan Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1	Belanja Langsung	3.324.930.000,-	3.263.447.156,-
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.550.010.000,-	1.546.579.060,-
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	264.920.000,-	263.104.865,-
c.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	680.000.000,-	678.867.990,-
d.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	830.000.000,-	774.895.241,-
2	Belanja Tidak Langsung	4.706.410.952,-	4.330.064.536,-
	Total	8.031.340.952,-	7.593.511.692,-

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2017 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan dan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib administrasi perkantoran.

2) Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya APIP yang tepat fungsi dan profesional. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini diantaranya Pendidikan dan pelatihan formal, Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja, study Komprehensif Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Wonosobo ke Kabupaten Bangli Bali dan Kota Bandung. Selain itu untuk peningkatan kapasitas APIP ke level 2 telah dilaksanakan Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP.

4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program ini bertujuan untuk meminimalisir indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya review terhadap LKD, RKA, Renstra, Laporan Kinerja Daerah dan Review penyerapan anggaran.

Untuk meningkatkan prosentase Tindak Lanjut hasil pemeriksaan pengawas Internal (APIP) ataupun Pengawas Eksternal serta diharapkan dapat mendukung capaian Opini WTP, setiap tahun inspektorat melakukan Gelar Pengawasan Daerah.

Dalam rangka penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dalam hal upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, inspektorat telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya sosialisasi gratifikasi dan pengendalian gratifikasi, pembentukan satuan tugas dan pelaksanaan tugas tim sapu bersih pungutan liar dalam penyelenggaraan layanan publik di Kabupaten Wonosobo, Pendampingan/Asistensi Pemeriksaan Aparat Penegak Hukum Pengawas External, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus serta monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat juga wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, terutama dalam hal penggunaan dana transfer desa, pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan monev dana desa dan serapannya.

c. Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

Tabel. III.F.2.2
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2017
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci EKPPD

No.	Indikator Kinerja Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021	Capaian Kinerja	
		Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017
1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal dan BPK	Prosentase Tindak Lanjut atas pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Wonosobo: 57,58% - Prosentase Tindak Lanjut atas pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah: 88,73% - Prosentase Tindak Lanjut atas pemeriksaan BPK : 70,15%	Prosentase Tindak Lanjut atas pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Wonosobo: 73,42% - Prosentase Tindak Lanjut atas pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah: 91,81% - Prosentase Tindak Lanjut atas pemeriksaan BPK : 69,13%

Sumber: Inspektorat, 2017

Tabel. III.F.2.3
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2017
Berdasarkan Indikator RKPD 2017

No.	Indikator kinerja	Realisasi capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi capaian 2017	Persen realisasi capaian 2017	Status capaian
1.	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal dan BPK	70,15%	78,77%	78,12%	99,17%	→
2.	Level APIP	1,3	1,3	2	200,00%	○
3.	Persentase kasus yang dilaporkan melalui whistle blowing system	Belum ada	5%	0%	0,00%	↓
4.	Persentase OPD yang menerapkan SPIP	0%	20%	2,13%	10,65%	↓

Keterangan Status Capaian:

III.F.2. Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

○	:Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
→	:Tidak tercapai	Realisasi capaian 90%- 99%
↓	:Tidak tercapai dan perlu upaya keras	Realisasi capaian $\leq 90\%$

Capaian kinerja urusan pengawasan jika dilihat dari indikator yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo yang tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2017, indikator yang tercapai adalah persentase tindak lanjut atas pemeriksaan yaitu 78,12%, namun jika dirinci berdasarkan tingkatannya, tindak lanjut atas pemeriksaan BPK berada pada level paling rendah hanya 69,13%, dibandingkan dengan Tindak Lanjut atas pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Wonosobo 73,42% dan Prosentase Tindak Lanjut atas pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 91,81%, bahkan jika dibandingkan capaian tahun 2016 mengalami penurunan. Untuk level APIP capaian 2017 sudah tercapai yaitu pada level 2; Infrastructure (APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi). Namun target yang ditetapkan dalam RPJMD ini perlu direview mengingat pelevelan APIP 1-5. Sedangkan untuk persentase kasus yang dilaporkan melalui whistle blowing sistem masih 0, hal ini disebabkan aplikasi masih tergolong baru dan belum disosialisasikan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dan surat Menteri PAN dan RB Nomor B/241/S.PP.03/2017 tentang Program Penguatan Penerapan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, mengamanatkan bahwa semua pengaduan masyarakat agar dilaporkan melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat System Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR-SPAN), sehingga pengaduan masyarakat melalui Whistle Blowing Sistem (WBS) tidak digunakan. Namun demikian mengingat sistem ini masih baru dan belum disosialisasikan kepada masyarakat maka untuk sementara pada tahun 2017 pengaduan masyarakat masih dilakukan secara manual.

Indikator lain dalam urusan pengawasan adalah persentase OPD yang menerapkan SPIP, dari target yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2017 sebesar 20% baru tercapai 2,13% . Hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap pentingnya SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan masing-masing perangkat daerah.

d. Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel. III.F.2.4.

Kondisi Sarana dan Prasarana Inspektorat

No	NAMA BARANG	Nilai (Rp)
	ASET TETAP	6.512.574.992,80
1	Tanah	1.000.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.960.982.067,80
	Alat-alat Besar	11.990.000,00
	Alat-alat Angkutan	1.143.481.833,80

III.F.2. Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

No	NAMA BARANG	Nilai (Rp)
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.629.321,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	726.976.613,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	61.561.100,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	3.343.200,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	7.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan	3.551.592.925,00
	Bangunan Gedung	3.551.592.925,00
	Monumen	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
	Jalan dan Jembatan	0,00
	Bangunan Air/Irigasi	0,00
	Instalasi	0,00
	Jaringan	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
	Buku dan Perpustakaan	0,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2017

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam penyelenggaraan urusan pengawasan antara lain :

Tabel. III.F.2.5
Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Pengawasan

No	Permasalahan	Solusi
1	Temuan terhadap pemeriksaan tiap tahun meningkat namun kemauan dan kesadaran untuk menindaklanjuti atas pemeriksaan dari masing-masing perangkat daerah sebagian besar masih kurang.	- Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan ditingkatkan, sehingga dapat meminimalisir temuan. - Pemberian motivasi dan peningkatan komitmen bagi kepala OPD dalam menindaklanjuti atas

III.F.2. Fungsi Lain Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

No	Permasalahan	Solusi
		pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP
2	Level APIP masih rendah	Peningkatan kapasitas APIP
3	Pengaduan masyarakat rendah	Optimalisasi aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat System Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR-SPAN)
4	Pemahaman terhadap pentingnya SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih rendah	Penguatan SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah